

PENGARUH KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PONTIANAK

Shella Ayu Larasati ^{1*)}, Ninik Kurniasih ², Uray Muhammad Nur ³

Politeknik Negeri Pontianak

*email penulis korespondensi: shellaayu.lrst@gmail.com

Abstract

Purpose – The purpose of this research is to determine the Effect of Financial Management Performance of the Pontianak Municipal Government on the Human Development Index of Pontianak City. In this study, the researchers put the limit in the problem, which is an analyzed period from 2016 to 2021

Method – The method used in this research is a associative methods. This research is performed using documentation data collection techniques and library studies. The data analysis technique used are the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, and the ratio of regional financial dependency, the next one will be tested using the statistical test with SPSS 29.0.

Result – The results of this study indicate that the result of the study show that: partially, the ratio of the degree of fiscal decentralization has no effect on the human development index, this is demonstrated by the t test with a significant value of 0.501; partially, the ratio of the degree of fiscal decentralization has no effect on the human development index, this is demonstrated by the t-test with a significant value of 0.956; partially, the ratio of regional financial dependency has no effect on the human development index, this is demonstrated by the t-test with a significant value of 0.252; simultaneously the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, and the ratio of regional financial dependence have no effect on the human development index, this is demonstrated by the f-test with a significant value of 0.471.

Implication – Regional governments should make policies that can improve regional facilities and infrastructure even better, build superior schools in urban to rural areas and update the education system, as well as encourage and motivate people to continue trying by opening a business.

Keywords : Performance, Decentralization Ratio, Independence Ratio, Dependency Ratio, Human Development Index

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini telah berkembang semakin pesat. Hal tersebut didasari karena adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Nasib pemerintahan sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah tersebut. Jika sebuah daerah dapat mengelola keuangannya secara baik, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang kuat dan mampu untuk terus berkembang. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan disebut pemerintahan sangat berdampak terhadap kinerja pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

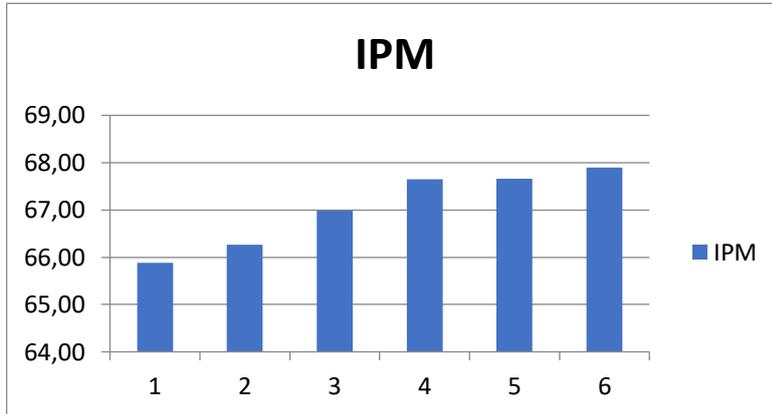
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. apabila pemerintah daerah telah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal maka pemerintah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai pemerintah daerah.

Keuangan daerah di Indonesia sendiri dikelola oleh Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Cara pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan sesuai dengan aspirasi pembangunan serta tuntutan masyarakat merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan pada suatu daerah dapat menimbulkan efek negatif antara lain tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nations*

Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2023

Gambar 1. Grafik Histogram Indeks Pembangunan Manusia

Dilihat dari data diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kota Pontianak mengalami kenaikan atau peningkatan disetiap tahunnya, sehingga dapat membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak berjalan semakin baik dengan peningkatan disetiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak bisa dikatakan tinggi, tetapi belum bisa dikatakan ideal karena nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak belum mencapai angka 100 yaitu angka ideal Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dan berpengaruh yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Rasio keuangan yang digunakan sebagai indikator untuk menilai pengaruh kinerja keuangan pemerintah Kota Pontianak terhadap indeks pembangunan manusia Kota Pontianak antara lain rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, dan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai provinsi terluas keempat di Indonesia. Terdapat 14 (empat belas) Kabupaten atau Kota dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Pontianak memiliki keunggulan di bidang perdagangan dan jasa. Pusat-pusat perbelanjaan besar seperti mall dan pusat-pusat perbelanjaan medium lainnya berkembang pesat di Kota Pontianak. Pusat-pusat pendidikan dan jasa lainnya juga mengalami hal yang serupa seperti perguruan tinggi di Kota Pontianak yang menjadi incaran dari lulusan sekolah menengah dari semua daerah di Kalimantan Barat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, selain yang memilih melanjutkan pendidikan tinggi ke Pulau Jawa.

Pada awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 27 Januari 2020 di Bali, Pemerintah Kota Pontianak menerima penilaian dari Kementerian PANRB RI atas evaluasi penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pemerintah Kabupaten atau Kota dengan menyandang Peringkat BB. Pemerintah Kota Pontianak bersama Walikota Pontianak periode sebelumnya (Periode 2008-2018) yaitu Sutarmidji (Gubernur Kalimantan Barat saat ini), meraih banyak penghargaan. Antara lain sejak tahun 2011, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Pontianak yang selalu mendapat predikat WTP dari BPK RI hingga tahun 2021. Pada tahun 2015, Pemkot Pontianak mendapat anugerah sebagai Pemda dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia oleh Ombudsman RI. Kemudian penghargaan bergengsi yang pernah diraih Sutarmidji adalah Walikota Terbaik Tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Tabel 1. Opini Yang Diraih Oleh Pemerintah Kota Pontianak

Tahun	Opini	Keterangan
2017	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan standar profesional akuntan publik, ada 5 (lima) jenis opini audit paling umum dikeluarkan seorang auditor yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Opini Penolakan (*Disclaimer Opinion*), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Modified Unqualified Opinion*), Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*). Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, Pemerintah Kota Pontianak telah mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menyajikan laporan keuangannya secara akrual, transparan dan akuntabel, sehingga dapat diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pontianak sangat bagus karena Pemerintah Kota Pontianak dapat mempertahankan penghargaan Opini WTP tersebut selama 11 tahun berturut-turut.

Selain penghargaan WTP yang telah diperoleh, Pemerintah Kota Pontianak juga mendapatkan penghargaan menjadi kota terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023. Pada tahun 2022 IPM Kota Pontianak berada di angka 80,48 persen, meningkat 0,55 poin dibanding IPM tahun sebelumnya yakni 79,93. Nilai itu mengantarkan Kota Pontianak dengan IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dan peringkat kelima tingkat Kota se-Kalimantan.

Hal yang mendorong peneliti melakukan ini yaitu berdasarkan Penelitian terdahulu yang merujuk tentang pengaruh kinerja keuangan Pemerintah Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu penelitian Sari (2020), adanya rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap IPM dan rasio kemandirian daerah

berpengaruh negatif terhadap IPM. Sementara Hamimah (2020), rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan pada rasio belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan pemaparan tersebut hal ini menjadi fenomena yang dihadapi Kota Pontianak dalam kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kota Pontianak terhadap indeks pembangunan manusia kota Pontianak.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Menurut Rusiadi (2016) dalam Achmad 2022, metode asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 (dua) variabel atau lebih. Dalam penelitian asosiatif terdapat 3 (tiga) bentuk hubungan yang mendasarinya, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. jenis Penelitian ini mengacu pada hubungan kausal yang dimana hubungan ini menunjukkan hubungan yang bersifat sebab akibat dengan menunjukkan adanya variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Pemerintah Kota Pontianak. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus biasanya dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang penulis dapatkan berupa sumber-sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informasi. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperoleh berupa berkas laporan keuangan Kota Pontianak Tahun 2016-2021 dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Selain itu, peneliti mengambil data tambahan dari berbagai sumber yang terdapat pada buku, jurnal ilmiah serta penelitian terdahulu.

Variabel Penelitian

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasinya, Mahmudi (2009). Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerahnya, Mahmudi (2007). Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah

Menurut Mahmudi (2007), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Indeks Pembangunan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dinilai dari kinerja Pemerintah Daerah itu sendiri. Cara pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan sesuai dengan aspirasi pembangunan serta tuntutan masyarakat juga dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan pada suatu daerah dapat menimbulkan efek negatif antara lain tingkat pelayanan bagi masyarakat yang rendah dan tidak mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia tergolong menjadi 4 (empat) bagian status klasifikasi, yaitu : IPM < 60 kategori rendah, IPM 60 ≤ IPM < 70 kategori sedang, IPM 70 ≤ IPM < 80 kategori tinggi, dan IPM ≥ 80 kategori sangat tinggi. Semakin tinggi status klasifikasi IPM terhadap suatu daerah maka dapat dinilai bahwa kinerja dari suatu daerah sudah tergolong sangat baik dan otomatis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari daerah itu sendiri telah mengalami kenaikan.

Analisis Data

Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah.

Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Hasil dari analisis tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai kritis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan SPSS versi 26. Data terdistribusi normal jika nilai signifikansi dari uji *kolmogorov-smirnov* $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance $> 0,01$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b) Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance $< 0,01$, maka terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan bagian dari statistic *non-parametric* yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp Sig (2-tailed) uji *Run Test*. Apabila nilai *Asymp Sig (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Uji *Run Test* akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada *Durbin Watson Test* yaitu nilai d terletak antara Dl dan Du atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ yang akan menyebabkan tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan *DW test* (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedasitas

Menurut ghozali (2016) Biasanya data cross section mengandung situasi heteroskedasitas karena data ini data menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS. Berikut cara pengambilan keputusan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas diantaranya:

1. Jika nilai signifikannya $< \alpha = 0,05$, maka terjadi heteroskedasitas
2. Jika nilai signifikannya $> \alpha = 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedasitas

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018) Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 \dots + b_n X_n$$

Keterangan :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi Model

X_1 = Kemampuan Keuangan Daerah

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t biasanya disebut dengan uji parsial, uji t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang menjelaskan sejauh mana variabel dependen secara parsial. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam uji t adalah perbandingan nilai *thitung* dengan *ttabel* dengan tingkat signifikan yang sudah ditetapkan sebesar 0,05 ($\alpha=0,05$). Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yaitu:

- 1) H_0 diterima apabila *thitung* berada di daerah penerimaan, dimana *thitung* < *ttabel* atau $\text{sig} > \alpha$ (0,05).
- 2) H_0 ditolak apabila berada di daerah penolakan H_0 , dimana *thitung* > *ttabel* atau $\text{sig} < \alpha$ (0,05)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan atau Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini Uji statistik f tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,5 atau 5%. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi mempunyai nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil artinya variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai yang

mendekati 1 artinya variabel independen menyediakan hampir seluruh informasi perlu untuk memprediksi variabel Dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Dalam penyajian data ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan ialah rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Sedangkan variabel dependen yang digunakan ialah Indeks Pembangunan Manusia.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Rasio ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui posisi keuangannya. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal pada Pemerintah Kota Pontianak selama tahun 2016-2021 terlihat dari hasil perhitungan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi
2016	389,368,654,493.49	1,510,803,996,550.49	25%
2017	476,050,410,313.57	1,545,622,287,316.32	30%
2018	440,358,120,030.76	1,663,204,429,559.76	26%
2019	478,790,894,895.49	1,764,013,422,654.14	27%
2020	403,176,698,952.86	1,547,166,420,989.86	26%
2021	413,401,936,269.61	1,573,721,427,450.69	26%

Sumber : data diolah, 2023

Rasio derajat desentralisasi fiskal daerah diketahui dengan rata-rata sebesar 26% sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah Kota Pontianak dapat dikatakan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak belum mampu untuk membiayai belanja daerahnya sendiri dan Pemerintah Kota Pontianak masih bergantung pada Pemerintah Pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah Pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Rasio ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui posisi keuangannya. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pontianak selama tahun 2016-2021 terlihat dari hasil perhitungan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer dapat dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
2016	389,368,654,493.49	1,022,715,733,567.00	38%
2017	476,050,410,313.57	1,063,061,877,002.75	45%
2018	440,358,120,030.76	1,158,053,989,529.00	38%
2019	478,790,894,895.49	1,216,104,828,185.00	39%
2020	403,176,698,952.86	1,062,590,864,860.00	37%
2021	413,401,936,269.61	1,090,807,268,181.08	37%

Sumber : data diolah, 2023

Rasio kemandirian keuangan daerah diketahui dengan rata-rata 37%. Hal ini membentuk pola konsultatif sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pontianak tergolong rendah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa peranan dari pemerintah pusat masih terbilang kurang, karena mengingat tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonom daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Rasio ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui posisi keuangannya. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pontianak selama tahun 2016-2021 terlihat dari hasil perhitungan pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah dapat dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2016	1,022,715,733,567.00	1,510,803,996,550.49	67%
2017	1,063,061,877,002.75	1,545,622,287,316.32	68%
2018	1,158,053,989,529.00	1,663,204,429,559.76	69%
2019	1,216,104,828,185.00	1,764,013,422,654.14	69%
2020	1,062,590,864,860.00	1,547,166,420,989.86	68%
2021	1,090,807,268,181.08	1,573,721,427,450.69	69%

Sumber : data diolah, 2023

Rasio ketergantungan keuangan daerah diketahui dengan rata-rata 68%. Hal ini dikatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Pontianak tergolong sangat tinggi dikarenakan nilai rata-rata dari rasio ketergantungan keuangan daerah lebih dari 50%. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Kota Pontianak belum mampu dalam meningkatkan kemampuan daerahnya dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD dan masih bergantung terhadap Pemerintah Pusat.

Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengetahui variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak Tahun 2016-2021 :

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak Tahun 2016-2021

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2016	65.88
2017	66.26
2018	66.98
2019	67.65
2020	67.66
2021	67.90

Sumber: BPS kota Pontianak,2023

Dapat dilihat pada Tabel 4.4, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kota Pontianak mengalami kenaikan atau peningkatan disetiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia diketahui dengan nilai 67,66 yang berarti bahwa Indeks Pembangunan Manusia tergolong dalam kriteria sedang. Jika pembangunan manusia daerah berada pada kriteria sedang, berarti kinerja pembangunan manusia sudah optimal dan harus dipertahankan agar kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kota Pontianak juga telah berhasil meraih banyak penghargaan yaitu salah satunya adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh selama 11 (sebelas) tahun berturut dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kota Pontianak telah berhasil mencapai kualitas pembangunan manusia yang optimal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Hasil dari analisis tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai kritis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan SPSS versi 29.

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		X ₁ (RD)	X ₂ (RK)	X ₃ (RKT)	Y (IPM)
N		6	6	6	6
Normal Parameters ^a	Mean	26.0867	39.3483	68.83833	67.055
	Std. Deviation	3.46221	2.7187	0.664332	0.83095
Most Extreme Differences	Absolute	0.297	0.348	0.239	0.263
	Positive	0.214	0.348	0.125	0.164
	Negative	-0.297	-0.297	-0.239	-0.263
Kolmogorov-Smirnov Z		0.297	0.348	0.239	0.263
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.107	0.067	.200 ^e	.200 ^e

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat Asymp.Sig menunjukkan rata rata setiap variabel yang diamati baik X₁ (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal), X₂ (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah), X₃ (Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah) dan Y (Indeks Pembangunan Manusia) menunjukkan bahwa nilai berada diatas 0,05 yang berarti data berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* merupakan data yang terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.961	37.761		0.317	0.781		
	X ₁ RD	-0.12	0.147	-0.5	-0.815	0.501	0.046	2.175
	X ₂ RK	-0.012	0.186	-0.038	-0.063	0.956	0.468	2.138
	X ₃ RKT	0.853	0.536	0.682	1.592	0.252	0.944	1.059

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,046, rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,468, dan rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 0,944 yang berarti nilai dari semua variabel independen lebih besar dari 0,1. jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 untuk semua variabel maka dapat dinyatakan tidak ada gejala multikolinieritas, sedangkan jika dilihat dari nilai vif untuk rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 2.175, rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 2.138, dan rasio ketergantungan keuangan

dearah sebesar 1.059, dapat diketahui bahwa semua variabel independen lebih kecil dari 10 yang artinya tidak ada gejala multikolinieritas.

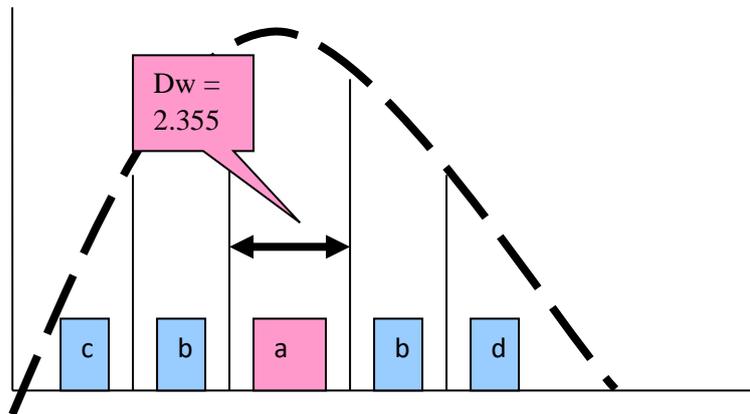
Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.809 ^a	.654	.135	.77299834992	2.355
a. Predictors: (Constant), X ₃ RKT, X ₂ RK, X ₁ RD					
b. Dependent Variable: Y IPM					

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Jika nilai DW diterjemahkan ke dalam grafik histogram maka performanya akan tampak sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Gambar 2. Distrubusi Normal Hasil Dw

Keterangan :

a = tidak terjadi autokorelasi

b = tidak dapat disimpulkan

c = ada autokorelasi negatif

d = ada autokorelasi positif

Berdasarkan Tabel Durbin Watson pada n = 6 dengan k = 1 maka nilai dL dan dU :

dL = 0,39

dU = 1,142

4-dU = 2,858

4-dL = 3,61

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai $D_w = 2,276$ yang berada pada daerah a. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.762	8.544		-1.143	.372
	X ₁ RD	.080	.033	.963	2.399	.139
	X ₂ RK	-.106	.042	-.999	-2.511	.129
	X ₃ RKT	.177	.121	.409	1.462	.281

a. Dependent Variable: Abs

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel diatas, hasil uji heterosdekastisitas menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,139, rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,129, dan rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 0,281 yang berarti tiap variabel independen penelitian memberikan kontribusi diatas nilai signifikansi yaitu 0,05 (Tidak Signifikan (> 0,05)), sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk model regresi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) tidak mengalami heterosdekastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Tabel 10. Analisis Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.961	37.761		.317	.781
	X ₁ RD	-.120	.147	-.500	-.815	.501
	X ₂ RK	-.012	.186	-.038	-.063	.956
	X ₃ RKT	.853	.536	.682	1.592	.252

a. Dependent Variable: Y IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Dari Tabel uji regresi berganda di atas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y (IPM) = 11.961 - 0.120 RD - 0.012 RK + 0.853 RKT$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa :

1. *Constanta* atau konstanta sebesar 11.961 menyatakan jika Raio Derajat Desentralisasi Fiskal bernilai nol (RD=nol), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah bernilai nol (RK=0), dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah bernilai nol (RKT=0), maka nilai IPM sebesar 11.961.
2. RD mempunyai koefisien regresi sebesar - 0.120 menyatakan bahwa setiap 1% RD (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mengalami penurunan sebesar 0.120. Begitu pula sebaliknya, jika RD naik 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka nilai IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0.120.
3. RK mempunyai koefisien regresi sebesar - 0.012 menyatan bahwa setiap 1 % RK (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mengalami penurunan sebesar 0.012. Begitu pula sebaliknya, jika RK turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka nilai IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0.012.
4. RKT mempunyai koefisien regresi sebesar 0.853 menyatan bahwa setiap 1 % RKT (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diprediksi mengalami kenaikan sebesar 0.853. Begitu pula sebaliknya, jika RKT turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka nilai IPM akan mengalami penurunan sebesar 0.853.

Uji t (Uji koefisien Regresi secara Persial)

Tabel 11. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.961	37.761		.317	.781
	X1 RD	-.120	.147	-.500	-.815	.501
	X2 RK	-.012	.186	-.038	-.063	.956
	X3 RKT	.853	.536	.682	1.592	.252

a. Dependent Variable: Y IPM

Sumber : data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian Uji t pada Tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa:

1. X_1 (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal) mempunyai nilai signifikansi 0,501, yang artinya jika melebihi $\alpha=5\%$ maka dapat diartikan bahwa X_1 (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal) tidak berpengaruh pada Y (Indeks Pembangunan Manusia).
2. X_2 (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) mempunyai nilai signifikansi 0,956, yang artinya jika melebihi $\alpha=5\%$ maka dapat diartikan bahwa X_2 (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) tidak berpengaruh pada Y (Indeks Pemabngunan Manusia).
3. X_3 (Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah) mempunyai nilai signifikansi 0,252, yang artinya jika melebihi $\alpha=5\%$ maka dapat diartikan bahwa X_3 (Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah) tidak berpengaruh pada Y (Indeks Pemabngunan Manusia).

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan daerah mempunyai nilai lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0,05) yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) pada pemerintah Kota Pontianak.

Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

Tabel 12. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.257	3	.752	1.259	.471 ^b
	Residual	1.195	2	.598		
	Total	3.452	5			

a. Dependent Variable: Y IPM

b. Predictors: (Constant), X_3 RKT, X_2 RK, X_1 RD

Sumber : data sekunder diolah, 2023

Dari uji ANOVA (*Analysis Of Varians*) atau Uji F pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat signifikasi sebesar 0,471 yang mana lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu $\alpha = 0.05$, yang artinya rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada pemerintah Kota Pontianak.

Uji Analisis Korelasi Koefisien (R^2)

Tabel 13. Uji Korelasi Koefisien (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.809 ^a	.654	.135	.77299834992

a. Predictors: (Constant), X_3 RKT, X_2 RK, X_1 RD

Sumber : data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel diatas diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,654 atau 65,40%. Hal ini berarti 65,40% dari variabel Y (IPM) bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh X_1 (RD), X_2 (RK), dan X_3 (RKT). Sedangkan sisanya 34.60% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah Kota Potianak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Halim (2020), menyatakan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh secara signifikan dan menunjukkan hubungan negatif terhadap IPM. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan dan menunjukkan hubungan yang positif terhadap IPM.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hasil hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah Kota Potianak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2020) yang memaparkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hasil hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah Kota Potianak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Digdowiseiso (2022) yang memaparkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah dan Rasio ketergantungan fiskal tidak berpengaruh menunjukkan hubungan yang negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, hasil hipotesis keempat menyatakan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah secara bersama-sama tidak

berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerintah Kota Pontianak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhanti (2022), yang memaparkan bahwa variabel kinerja keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2017 – 2019 terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 – 2020.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil analisis dan pengujian serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pontianak terhadap indeks pembangunan manusia Kota Pontianak, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kota Potianak tahun 2016-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,501 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha=0,05$ yang artinya Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kota Potianak tahun 2016-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,956 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha=0,05$ yang artinya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kota Potianak tahun 2016-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan (sig.) sebesar 0,252 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha=0,05$ yang artinya Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kota Potianak tahun 2016-2021. Hal ini ditunjukkan dengan nilai uji statistik f sebesar sebesar 0,471 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha=0,05$ yang artinya Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan manusia

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran yang ingin diajukan untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk penelitian berikutnya. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang lebih bervariasi dan lengkap serta peneliti selanjutnya dapat

menyelesaikan sisa hasil pengujian pada data yang telah diuji oleh peneliti yaitu sebesar 34,60% yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Batasan

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang lebih bervariasi dan lengkap 'Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kualitas hasil penelitian.

REFERENSI

- Achmad, I., Novaria, R., dan Widiyanto, K., (2022), *Pengaruh Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Bagong Surabaya)*.
- Badan Pusat Statistik, (2021), *Indeks Pembangunan Manusia 2021*, Kalimantan Barat : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2019), *Indeks Pembangunan Manusia 2019*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2019), *Indeks Pembangunan Manusia 2019*, Sumatera Selatan : Badan Pusat Statistik.
- Digdowniseiso, Kumba dan Muhammad Bahtiar Satrio, (2022), *Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(5).
- Halim, Abdul, (2012), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, (2007), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanif, Muhammad Irfan, (2018), *Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening* [Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta], uii.ac.id.
- Hendri, Zul dan Meileni Yafiza, (2020), *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis)*, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56-66.
- Harliyani, Eka Marisca dan Haryadi, (2016), *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129-140.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 3 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prasetio, Tofan Wahyu Dwi, (2018), *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam* [Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung], Radenintan.ac.id.
- Ramadhanti, Hanifa, (2022), *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2019*. *Bandung Conference Series: Economics Studies*,2(2), 480-487.
- Sari, Febri NurGita, (2020), *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1-16.
- Sunarni, (2017), *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Indonesia* [Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung], unila.ac.id.
- Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 3 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wibawa, Gian Riksa dan Arif, (2021), *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 3(2), 88-100.
- Wiliyana, Aan Andri, (2019), *Spatial Spillovers Pada Kasus Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Dengan Pendekatan Spatial Durbin Error Model Panel* [Jurnal Ilmiah, Program Studi Statistika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah, Semarang], unimus.ac.id.



Yani, Akhmad dan Zulkarnain, (2020), Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak. *Widya Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 19-31.